

The Effect of Independent Board of Commissioners and Audit Committee on Environmental, Social, and Governance Disclosure with Foreign Ownership As A Moderating Variable

Pengaruh Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Pengungkapan *Environmental, Social, And Governance* dengan Kepemilikan Asing Sebagai Variabel Moderasi

Miftah Aulia^{1*}, Husaini², Saiful³

Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bengkulu

¹miftahaulia.ma@gmail.com

Abstract

This study examines the effect of independent commissioners and audit committees on Environmental, Social, and Governance (ESG) disclosure and tests the moderating role of foreign ownership. The study is motivated by the growing demand for non-financial transparency and by inconsistent empirical findings regarding the effectiveness of corporate governance mechanisms in enhancing ESG disclosure. A quantitative approach is employed using secondary data from non-financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange during 2021-2023. The sample was selected through purposive sampling and consists of 134 firms or 402 firm-year observations. ESG scores were obtained from ESG Intelligence, while data on independent commissioners, audit committees, and foreign ownership were collected from annual reports. Multiple linear regression was used to test direct effects, while moderated regression analysis was applied to test interaction effects. The results indicate that independent commissioners do not have a direct effect on ESG disclosure, whereas the audit committee has a positive effect on ESG disclosure. The study also finds that foreign ownership strengthens the relationship between independent commissioners and ESG disclosure, but does not moderate the relationship between the audit committee and ESG disclosure. These findings imply that the effectiveness of corporate governance mechanisms in improving ESG disclosure is not uniform. The supervisory role of independent commissioners becomes effective when supported by external pressure from foreign investors, while the audit committee exerts a more direct influence because of its proximity to internal control and reporting integrity. This study contributes to the literature by clarifying the distinction between formal monitoring mechanisms and operational monitoring mechanisms in the context of ESG disclosure in Indonesia.

Keywords: *ESG disclosure; independent commissioners; audit committee; foreign ownership; corporate governance*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh dewan komisaris independen dan komite audit terhadap pengungkapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) serta menguji peran kepemilikan asing sebagai variabel moderasi. Kajian ini berangkat dari meningkatnya tuntutan terhadap transparansi non-keuangan dan dari inkonsistensi temuan empiris mengenai efektivitas mekanisme tata kelola perusahaan dalam mendorong pengungkapan ESG. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder pada perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021-2023. Sampel dipilih dengan teknik purposive sampling dan menghasilkan 134 perusahaan atau 402 observasi. Skor ESG diperoleh dari ESG Intelligence, sedangkan data dewan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan asing diperoleh dari laporan tahunan perusahaan. Analisis dilakukan menggunakan regresi linear berganda untuk menguji pengaruh langsung dan *moderated regression analysis* untuk menguji efek interaksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ESG, sedangkan komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan ESG. Penelitian ini juga membuktikan bahwa kepemilikan asing memperkuat hubungan antara dewan komisaris independen dan pengungkapan ESG, tetapi tidak terbukti memoderasi hubungan antara komite audit dan

pengungkapan ESG. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan ESG bersifat tidak seragam. Fungsi pengawasan dewan komisaris independen cenderung baru efektif ketika memperoleh dukungan tekanan eksternal dari investor asing, sedangkan komite audit berpengaruh secara lebih langsung karena lebih dekat dengan proses pengendalian internal dan integritas pelaporan. Penelitian ini berkontribusi dengan memperjelas perbedaan mekanisme pengawasan formal dan mekanisme pengawasan operasional dalam konteks pengungkapan ESG di Indonesia.

Kata kunci: Pengungkapan ESG; dewan komisaris independen; komite audit; kepemilikan asing; tata kelola perusahaan

1. Pendahuluan

Isu *Environmental, Social, and Governance* (ESG) telah berkembang dari sekadar diskursus etika bisnis menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberlanjutan, kualitas tata kelola, dan prospek jangka panjang perusahaan. Laporan keuangan yang bersifat historis tidak lagi memadai untuk menjelaskan seluruh risiko dan peluang yang dihadapi perusahaan, terutama risiko yang bersumber dari dampak lingkungan, hubungan sosial dengan pemangku kepentingan, dan kualitas tata kelola internal. Dalam konteks ini, pengungkapan ESG menjadi instrumen strategis yang memungkinkan perusahaan menyampaikan komitmen, kebijakan, praktik, dan kinerja non-keuangan secara lebih transparan kepada investor, kreditur, regulator, serta masyarakat luas.

Pentingnya pengungkapan ESG semakin kuat karena operasional perusahaan dapat menimbulkan eksternalitas yang luas. Aktivitas produksi, eksploitasi sumber daya, emisi, pengelolaan limbah, keselamatan kerja, hak tenaga kerja, hingga integritas tata kelola memiliki konsekuensi ekonomi dan sosial yang tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, pasar modal modern semakin memberi perhatian pada kualitas pelaporan ESG sebagai salah satu cerminan kapasitas perusahaan dalam mengelola risiko jangka panjang, menjaga legitimasi sosial, dan menciptakan nilai berkelanjutan. Serafeim dan Yoon (2022) menunjukkan bahwa pasar merespons informasi ESG tertentu secara material, sedangkan Kim dan Li (2021) menegaskan bahwa ESG telah menjadi bagian dari pertimbangan penting dalam keuangan korporat.

Dalam konteks Indonesia, perdebatan mengenai pengungkapan ESG menjadi sangat relevan karena perusahaan berada pada fase transisi menuju pelaporan keberlanjutan yang lebih sistematis. Di satu sisi, dorongan regulasi dan tuntutan investor mendorong perusahaan untuk meningkatkan transparansi non-keuangan. Di sisi lain, kualitas pelaporan ESG antarperusahaan masih sangat beragam. Sebagian perusahaan telah memiliki laporan keberlanjutan yang komprehensif, sedangkan sebagian lainnya masih menempatkan pengungkapan ESG sebagai pelengkap formal dalam laporan tahunan. Variasi ini menunjukkan bahwa pengungkapan ESG tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan regulatif, tetapi juga oleh kualitas mekanisme pengawasan dan komitmen tata kelola yang dimiliki perusahaan.

Tata kelola perusahaan merupakan faktor penting yang diyakini memengaruhi kualitas pengungkapan ESG. Dalam struktur *two-tier board* yang dianut di Indonesia, dewan komisaris berfungsi mengawasi direksi, sedangkan direksi menjalankan pengelolaan perusahaan. Dalam struktur tersebut, dewan komisaris independen diharapkan menjadi mekanisme pengawasan yang objektif dan tidak terafiliasi, sehingga mampu mengurangi konflik keagenan dan menekan asimetri informasi. Pada saat yang sama, komite audit diposisikan sebagai organ pendukung dewan komisaris yang secara lebih teknis menelaah integritas pelaporan, kepatuhan, pengendalian

internal, dan proses audit. Secara teoritis, kedua mekanisme tersebut seharusnya dapat memperkuat kualitas pengungkapan ESG.

Walaupun demikian, temuan empiris mengenai pengaruh dewan komisaris independen dan komite audit terhadap pengungkapan ESG belum menunjukkan hasil yang konsisten. Sejumlah penelitian menemukan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan ESG, antara lain Arayssi, Jizi, dan Tabaja (2019), Gurol dan Lagasio (2023), serta Sirait dan Fuad (2024). Namun, penelitian lain justru menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap ESG, seperti Rahmadani, Adrianto, dan Alfarisi (2023) serta Birindelli, Dell'Atti, Iannuzzi, dan Savioli (2018). Inkonsistensi serupa juga terlihat pada variabel komite audit. Pozzoli, Alessandra, dan Francesco (2022), Buallay dan Al-Ajmi (2018), Holly, Tangke, Jao, dan Tanri (2024), serta Ardiani, Lindrawati, dan Susanto (2022) menemukan pengaruh positif komite audit terhadap pelaporan keberlanjutan atau ESG. Sebaliknya, Bicer dan Feneir (2019), Jimantoro, Maria, dan Rachmawati (2023), serta Umar, Firmansyah, Danlami, dan Al-Faryan (2024) menunjukkan hasil yang tidak signifikan.

Perbedaan hasil tersebut mengindikasikan bahwa hubungan antara tata kelola perusahaan dan pengungkapan ESG bersifat kondisional. Artinya, efektivitas mekanisme pengawasan internal mungkin tidak semata-mata ditentukan oleh struktur formal, tetapi juga dipengaruhi oleh konteks kepemilikan, tekanan investor, jenis industri, dan orientasi strategis perusahaan. Salah satu faktor eksternal yang patut diperhatikan adalah kepemilikan asing. Investor asing umumnya memiliki eksposur lebih besar terhadap standar global, sensitivitas reputasional yang lebih tinggi, dan ekspektasi yang lebih kuat terhadap akuntabilitas serta pelaporan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, kepemilikan asing dapat bertindak sebagai mekanisme eksternal yang memperkuat disiplin tata kelola internal dan mendorong perusahaan untuk meningkatkan kualitas pengungkapan ESG.

Penempatan kepemilikan asing sebagai variabel moderasi penting karena memberikan penjelasan yang lebih komprehensif atas ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu. Investor asing tidak hanya dapat memengaruhi perusahaan secara langsung melalui tuntutan atas transparansi, tetapi juga dapat mengubah efektivitas dewan komisaris independen dan komite audit. Kehadiran pemegang saham asing berpotensi memperkuat fungsi pengawasan dewan komisaris independen karena investor asing menuntut standar transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi. Di sisi lain, pengaruh kepemilikan asing terhadap komite audit mungkin berbeda, mengingat komite audit telah memiliki mandat teknis dan prosedural yang relatif kuat dalam sistem pengendalian internal perusahaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh dewan komisaris independen dan komite audit terhadap pengungkapan ESG serta menguji peran kepemilikan asing sebagai variabel moderasi. Penelitian berfokus pada perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021-2023. Kontribusi penelitian ini terletak pada tiga aspek. Pertama, penelitian ini memperjelas peran berbeda antara dewan komisaris independen sebagai mekanisme pengawasan formal dan komite audit sebagai mekanisme pengawasan operasional. Kedua, penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara tata kelola perusahaan dan pengungkapan ESG tidak selalu bersifat langsung, tetapi dapat bersifat kondisional melalui struktur kepemilikan. Ketiga, penelitian ini memperkaya bukti empiris di Indonesia dengan menggunakan data ESG

perusahaan nonkeuangan dan model moderasi yang memisahkan pengujian *direct effect* dan *interaction effect*.

2. Tinjauan Literatur dan Pengembangan Hipotesis

Agency Theory

Agency theory yang dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa pemisahan kepemilikan dan pengelolaan perusahaan menciptakan potensi konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. Pemegang saham sebagai *principal* mendelegasikan wewenang kepada manajemen sebagai *agent* untuk menjalankan perusahaan, tetapi kedua pihak tidak selalu memiliki tujuan yang sama. Dalam kondisi ini, asimetri informasi memberi ruang bagi manajemen untuk bertindak oportunistik, misalnya dengan menahan informasi, memilih pengungkapan yang menguntungkan citra jangka pendek, atau mengabaikan isu strategis yang belum memberikan dampak finansial langsung.

Dalam kerangka *agency theory*, pengungkapan ESG dapat dipahami sebagai salah satu mekanisme untuk menurunkan asimetri informasi. Ketika perusahaan mengungkapkan informasi lingkungan, sosial, dan tata kelola secara lebih luas, pemegang saham memiliki akses yang lebih baik untuk menilai profil risiko, kualitas pengelolaan, dan orientasi jangka panjang perusahaan. Namun, manajemen tidak selalu memiliki insentif untuk mengungkapkan informasi tersebut secara optimal, terutama jika pengungkapan dapat menimbulkan biaya reputasi atau memperlihatkan kelemahan tata kelola. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme monitoring yang efektif melalui dewan komisaris independen dan komite audit.

Dewan komisaris independen berperan sebagai pengawas yang relatif netral terhadap keputusan manajemen, sedangkan komite audit berfungsi memastikan integritas pelaporan dan keandalan informasi. *Agency theory* juga relevan untuk menjelaskan peran kepemilikan asing. Investor asing umumnya memiliki kemampuan *monitoring* yang lebih kuat, preferensi terhadap transparansi, serta pengalaman dengan standar pelaporan internasional. Kehadiran mereka dapat menambah lapisan pengawasan eksternal yang memperbesar tekanan terhadap manajemen untuk meningkatkan kualitas pengungkapan ESG.

Teori Legitimasi

Legitimacy theory berangkat dari pandangan bahwa perusahaan beroperasi berdasarkan kontrak sosial dengan masyarakat. Deegan (2004) menekankan bahwa perusahaan harus menyelaraskan aktivitasnya dengan nilai, norma, dan harapan sosial agar keberadaannya diterima. Suchman (1995) menambahkan bahwa legitimasi merupakan persepsi umum bahwa tindakan organisasi diinginkan, tepat, atau sesuai dalam suatu sistem norma dan keyakinan. Dengan demikian, legitimasi bukan sekadar masalah kepatuhan formal, tetapi menyangkut penerimaan sosial yang menopang kesinambungan usaha.

Pengungkapan ESG merupakan salah satu strategi penting untuk memperoleh dan mempertahankan legitimasi. Melalui pelaporan ESG, perusahaan menyampaikan bahwa kegiatan operasionalnya tidak semata-mata berorientasi pada laba, tetapi juga memperhatikan dampak lingkungan, tanggung jawab sosial, dan integritas tata kelola. Ketika publik, investor, atau regulator menilai perusahaan gagal memenuhi ekspektasi sosial, perusahaan berisiko menghadapi tekanan reputasi, berkurangnya kepercayaan pasar, dan meningkatnya biaya legitimasi.

Dalam konteks penelitian ini, dewan komisaris independen dan komite audit dapat dipahami sebagai mekanisme yang membantu perusahaan menjalankan strategi legitimasi secara lebih kredibel. Dewan komisaris independen diharapkan mendorong arah kebijakan yang lebih selaras dengan kepentingan pemangku kepentingan, sedangkan komite audit memastikan informasi yang disampaikan perusahaan dapat dipercaya. Kepemilikan asing juga memiliki peran penting karena investor asing cenderung membawa standar keberlanjutan yang lebih tinggi. Tekanan dari pemegang saham asing memperluas arena legitimasi perusahaan, dari semata-mata domestik menjadi juga internasional.

Environment, Social and Governance (ESG)

ESG merupakan kerangka evaluasi non-keuangan yang memotret bagaimana perusahaan mengelola dampak lingkungan, hubungan sosial, dan tata kelola. Kim dan Li (2021) memandang ESG sebagai bagian dari bagaimana perusahaan mengintegrasikan komitmen keberlanjutan ke dalam strategi bisnis. Roestanto, Vivianita, dan Nurkomalasari (2022) menegaskan bahwa pengungkapan ESG berfungsi sebagai sarana komunikasi perusahaan kepada pemangku kepentingan mengenai kinerja non-keuangan yang material. Dengan demikian, ESG tidak hanya mencerminkan kepedulian etis, tetapi juga kemampuan perusahaan mengelola risiko dan peluang yang memengaruhi nilai jangka panjang.

Dimensi *environmental* mencakup isu seperti penggunaan energi, emisi, pengelolaan limbah, air, dan dampak terhadap ekosistem. Dimensi *social* mencakup hubungan ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, keragaman, hak asasi manusia, keterlibatan masyarakat, dan tanggung jawab produk. Sementara itu, dimensi *governance* mencakup struktur dan praktik pengawasan, etika bisnis, integritas pelaporan, kepatuhan, dan hak pemegang saham. Integrasi ketiga dimensi ini penting karena kinerja ESG yang baik biasanya tidak dapat dicapai bila perusahaan hanya fokus pada satu dimensi sambil mengabaikan dimensi lainnya.

Dalam penelitian ini, pengungkapan ESG diukur menggunakan skor ESG *Intelligence* yang disusun berdasarkan indikator pengungkapan dengan acuan *Global Reporting Initiative*. Penggunaan skor ESG relevan karena memungkinkan perbandingan antarperusahaan secara lebih objektif. Namun, perlu dipahami bahwa skor ESG bukan hanya hasil dari adanya kebijakan formal, tetapi juga cerminan kapasitas organisasi dalam mengungkapkan informasi yang material dan dapat diverifikasi.

Tata Kelola Perusahaan

Tata kelola perusahaan merupakan seperangkat mekanisme yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajemen, dewan pengawas, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan perusahaan dikelola secara akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab. Denis dan McConnell (2003) memandang tata kelola perusahaan sebagai sistem pengendalian yang mengatasi persoalan *agency cost* dalam korporasi modern. Dalam konteks Indonesia, tata kelola perusahaan dijalankan melalui struktur *two-tier board* yang memisahkan fungsi pengawasan dan fungsi pengelolaan. Pemisahan ini penting untuk membangun mekanisme *check and balance*.

Prinsip utama tata kelola perusahaan mencakup *transparency, accountability, responsibility, independence*, dan *fairness*. Dalam praktiknya, kualitas tata kelola tidak hanya ditentukan oleh keberadaan organ formal, tetapi juga oleh efektivitas fungsi yang dijalankan. Perusahaan dapat memiliki struktur tata kelola yang tampak lengkap

secara administratif, tetapi belum tentu efektif secara substantif bila koordinasi antarorgan lemah, independensi rendah, atau pengawasan hanya bersifat simbolik.

Dalam kaitannya dengan ESG, tata kelola perusahaan berfungsi sebagai fondasi yang menentukan apakah isu keberlanjutan benar-benar menjadi bagian dari agenda strategis perusahaan. Dewan komisaris independen dan komite audit merupakan dua organ yang paling relevan dalam penelitian ini karena keduanya secara langsung berkaitan dengan pengawasan, akuntabilitas, dan kualitas pelaporan.

Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan, maupun hubungan keluarga dengan pihak-pihak yang dapat mengganggu independensinya. Posisi ini dirancang agar pengawasan terhadap direksi dapat dilakukan secara objektif. Dalam kerangka tata kelola perusahaan, komisaris independen diharapkan menjadi penyeimbang terhadap kepentingan manajemen dan pemegang saham pengendali.

Secara teoritis, komisaris independen dapat mendorong pengungkapan ESG melalui beberapa jalur. Pertama, independensi memungkinkan mereka untuk menuntut transparansi yang lebih tinggi dari manajemen. Kedua, mereka dapat mendorong manajemen untuk mempertimbangkan kepentingan pemangku kepentingan yang lebih luas, tidak hanya laba jangka pendek. Ketiga, mereka dapat memantau kepatuhan terhadap standar pelaporan dan praktik bisnis berkelanjutan. Namun, efektivitas komisaris independen sangat bergantung pada kualitas, pengalaman, keterlibatan, dan kapasitas mereka dalam memengaruhi keputusan strategis perusahaan.

Dalam banyak kasus, proporsi komisaris independen yang tinggi belum tentu berarti fungsi pengawasan berjalan optimal. Jika kehadiran komisaris independen hanya ditujukan untuk memenuhi regulasi, maka kontribusinya terhadap pengungkapan ESG bisa menjadi terbatas. Oleh karena itu, penting untuk menguji secara empiris apakah proporsi dewan komisaris independen benar-benar berpengaruh terhadap pengungkapan ESG.

Komite Audit

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris untuk membantu menjalankan fungsi pengawasan, terutama yang berkaitan dengan integritas pelaporan keuangan dan non-keuangan, efektivitas pengendalian internal, kepatuhan, dan pelaksanaan audit. Otoritas Jasa Keuangan menempatkan komite audit sebagai salah satu pilar penting dalam tata kelola perusahaan, karena komite ini memiliki kedekatan langsung dengan proses *review* dan evaluasi informasi yang disampaikan kepada publik.

Dibandingkan dewan komisaris independen, komite audit bekerja lebih dekat dengan infrastruktur pelaporan. Komite audit menelaah proses penyusunan laporan, kualitas data, peran auditor internal dan eksternal, serta kecukupan pengendalian. Dalam konteks ESG, peran tersebut menjadi penting karena pelaporan ESG menuntut akurasi informasi non-keuangan, konsistensi pengungkapan, dan dokumentasi yang memadai. Dengan fungsi seperti itu, komite audit secara teoritis memiliki peluang lebih besar untuk memengaruhi kualitas pengungkapan ESG secara langsung.

Ukuran komite audit dalam penelitian ini diproksi dengan jumlah anggota komite audit. Semakin banyak anggota komite audit, semakin besar kemungkinan adanya pembagian tugas, spesialisasi, dan kapasitas pengawasan yang lebih memadai.

Meski demikian, pengaruh positif tersebut tetap harus dibuktikan secara empiris karena jumlah anggota saja belum tentu otomatis mencerminkan kualitas kerja kolektif.

Kepemilikan Saham Asing

Sebagaimana dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 6, instrumen kepemilikan asing dipahami sebagai bentuk partisipasi modal di Indonesia yang bersumber dari pihak luar negeri. Hal ini mencakup investasi yang dilakukan oleh perseorangan berkewarganegaraan asing, korporasi internasional, hingga otoritas pemerintah negara lain yang mengalokasikan dananya di dalam negeri. Keberadaan investor asing turut mendorong perusahaan untuk lebih berorientasi pada pencapaian tujuan sosial (Al Amosh & Mansor, 2021). Chung *et al.*, (2002) mengungkapkan bahwa investor asing membawa pengetahuan dan pengalaman yang dapat memberikan dampak positif bagi perusahaan. Kehadiran investor asing berpotensi mendorong penerapan praktik tata kelola perusahaan secara efektif melalui transfer pengetahuan dan *standard* internasional yang mereka bawa (Farida dan Kusumadewi, 2019).

Hipotesis

Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Pengungkapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG).

Agency theory memprediksi bahwa komisaris independen dapat mengurangi perilaku oportunistik manajemen dan mendorong pengungkapan informasi yang lebih luas. Dalam konteks ESG, pengawasan yang lebih objektif diharapkan mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi mengenai lingkungan, sosial, dan tata kelola secara lebih transparan. *Legitimacy theory* juga memberi dukungan teoretis bahwa komisaris independen dapat membantu perusahaan menyelaraskan kebijakan dan pelaporannya dengan harapan masyarakat sehingga legitimasi perusahaan terjaga.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan kecenderungan positif. Arayssi, Jizi, dan Tabaja (2019), Gurol dan Lagasio (2023), Ellili (2022), serta Sirait dan Fuad (2024) menemukan bahwa keberadaan atau proporsi komisaris independen berhubungan positif dengan pengungkapan ESG. Argumennya, komisaris independen lebih sensitif terhadap kualitas pelaporan dan reputasi perusahaan di mata pemangku kepentingan.

Meski demikian, terdapat hasil yang berbeda pada penelitian Rahmadani, Adrianto, dan Alfarisi (2023) serta Birindelli, Dell'Atti, Iannuzzi, dan Savioli (2018) yang menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan. Perbedaan ini dapat dijelaskan oleh kemungkinan bahwa komisaris independen dalam beberapa perusahaan hanya berfungsi secara simbolik atau tidak cukup terlibat dalam agenda keberlanjutan. Namun, berdasarkan landasan teoretis dan dominasi bukti empiris yang mendukung arah positif, hipotesis pertama dirumuskan sebagai berikut.

Hipotesis 1 (H1): Dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG).

Pengaruh komite audit terhadap pengungkapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG).

Komite audit memiliki kedudukan penting dalam memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik akurat, relevan, dan dapat dipercaya. Dari perspektif

agency theory, komite audit berfungsi mengurangi asimetri informasi dan mengendalikan risiko *moral hazard* manajemen. Dalam konteks ESG, komite audit dapat mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi non-keuangan secara lebih andal karena komite ini terlibat dalam proses *review* atas sistem pelaporan, pengendalian internal, dan kepatuhan.

Berbagai penelitian terdahulu memberi dukungan pada pengaruh positif komite audit. Pozzoli, Alessandra, dan Francesco (2022), Buallay dan Al-Ajmi (2018), Holly, Tangke, Jao, dan Tanri (2024), Josua dan Septiani (2020), serta Ardiani, Lindrawati, dan Susanto (2022) menunjukkan bahwa komite audit yang lebih kuat cenderung berkorelasi dengan pengungkapan ESG atau *sustainability reporting* yang lebih baik. Logikanya, semakin besar kapasitas komite audit, semakin baik kemampuan pengawasan terhadap integritas pelaporan.

Namun demikian, terdapat pula penelitian yang tidak menemukan pengaruh signifikan, misalnya Bicer dan Feneir (2019), Jimantoro, Maria, dan Rachmawati (2023), serta Sirait dan Fuad (2024). Meski ada inkonsistensi, secara konseptual komite audit tetap lebih dekat dengan mekanisme pelaporan daripada organ tata kelola lainnya. Oleh sebab itu, hipotesis kedua dirumuskan sebagai berikut.

Hipotesis 2 (H2): Komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG).

Kepemilikan asing memperkuat pengaruh dewan komisaris independen terhadap pengungkapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG).

Kepemilikan asing dipandang sebagai bentuk pengawasan eksternal yang dapat memperkuat efektivitas mekanisme tata kelola internal. Investor asing umumnya memiliki pengalaman lintas yurisdiksi, ekspektasi tinggi terhadap transparansi, serta perhatian lebih besar pada isu keberlanjutan karena terkait dengan risiko reputasi, standar internasional, dan keberlanjutan investasi jangka panjang. Dalam situasi seperti itu, tekanan dari investor asing dapat membuat fungsi pengawasan komisaris independen menjadi lebih efektif.

Tanpa tekanan eksternal yang kuat, komisaris independen berpotensi hanya menjadi bagian dari struktur formal tata kelola. Namun, ketika perusahaan memiliki pemegang saham asing yang signifikan, komisaris independen memperoleh dukungan yang lebih besar untuk mendorong manajemen mengadopsi praktik pelaporan ESG yang lebih baik. Dengan kata lain, *foreign ownership* dapat meningkatkan daya dorong, kredibilitas, dan efektivitas dewan komisaris independen dalam memperjuangkan agenda transparansi keberlanjutan.

Tambunan dan Wahyuliza (2024) serta Ellili (2022) menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan ESG. Kim dan Li (2021) juga menegaskan bahwa investor global cenderung menilai perusahaan dari kualitas praktik ESG. Di samping itu, Hirmansah (2024) menunjukkan bahwa kepemilikan asing memiliki kaitan positif dengan kualitas hasil korporasi. Dengan menggabungkan argumen tersebut, hubungan antara dewan komisaris independen dan pengungkapan ESG diduga akan lebih kuat pada perusahaan dengan kepemilikan asing yang lebih tinggi.

Hipotesis 3 (H3): Kepemilikan asing memperkuat pengaruh dewan komisaris independen terhadap pengungkapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG).

Kepemilikan asing memperkuat pengaruh komite audit terhadap pengungkapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG).

Secara teoritis, investor asing juga berpotensi memperkuat hubungan antara komite audit dan pengungkapan ESG. Komite audit memiliki mandat teknis yang berkaitan dengan kualitas pelaporan, sedangkan investor asing memiliki kebutuhan tinggi terhadap keterbukaan informasi dan konsistensi standar. Bila kedua elemen ini bertemu, perusahaan seharusnya semakin terdorong untuk menghasilkan pengungkapan ESG yang lebih komprehensif dan dapat dipercaya.

Dalam perspektif *agency theory*, pengawasan komite audit dapat menjadi lebih tajam ketika didukung oleh tekanan dari pemegang saham asing. Investor asing menginginkan jaminan bahwa informasi ESG bukan sekadar narasi simbolik, tetapi didukung oleh sistem pengendalian, dokumentasi, dan review yang memadai. Oleh karena itu, secara logis *foreign ownership* dapat meningkatkan urgensi dan ruang gerak komite audit dalam mengevaluasi pelaporan ESG.

Meski demikian, sifat teknis dan prosedural komite audit juga mengisyaratkan kemungkinan hasil yang berbeda. Karena komite audit sudah dibentuk dalam kerangka regulasi yang cukup jelas, pengaruh investor asing mungkin tidak selalu menambah kekuatan yang berarti. Walaupun demikian, atas dasar ekspektasi bahwa investor asing menuntut standar pelaporan yang lebih tinggi, hipotesis keempat dirumuskan sebagai berikut.

Hipotesis 4 (H4): Kepemilikan asing memperkuat pengaruh komite audit terhadap pengungkapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG).

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kausalitas untuk menguji pengaruh variabel tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan ESG. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan, laporan keberlanjutan, serta sumber basis data ESG *Intelligence*. Objek penelitian adalah perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021-2023.

Pemilihan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Kriteria sampel meliputi: perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode pengamatan; perusahaan yang secara konsisten mempublikasikan laporan tahunan dan laporan yang relevan; perusahaan yang memiliki skor ESG pada ESG *Intelligence* selama 2021-2023; serta perusahaan yang menyajikan data lengkap atas seluruh variabel penelitian. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh 134 perusahaan sebagai sampel, sehingga total observasi dalam penelitian ini adalah 402 *firm-year*.

Tabel 1. Seleksi Sampel Penelitian

| Kriteria | Jumlah |
|--|------------|
| Perusahaan nonkeuangan di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023 | 850 |
| Perusahaan nonkeuangan yang tidak menyajikan informasi ESG secara lengkap selama periode 2021-2023 | (716) |
| Perusahaan yang menampilkan laporan tahunan dan informasi ESG lengkap 2021-2023 | 134 |
| Total sampel (3 tahun) | 402 |

Sumber: Data sekunder diolah (2025).

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan ESG. Skor ESG diperoleh dari ESG *Intelligence* yang menyusun penilaian berdasarkan indikator pengungkapan dengan acuan GRI. Variabel independen terdiri atas dewan komisaris independen dan komite audit. Dewan komisaris independen diukur menggunakan proporsi komisaris independen terhadap total dewan komisaris, sedangkan komite audit diukur dengan jumlah anggota komite audit. Variabel moderasi adalah kepemilikan asing yang diukur dengan persentase saham yang dimiliki investor asing terhadap total saham beredar.

Tabel 2. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

| Variabel | Jenis | Pengukuran | Sumber |
|-----------------------------------|------------|--|-------------------------|
| Pengungkapan ESG | Dependen | Skor ESG Intelligence berdasarkan tingkat pengungkapan indikator ESG dengan acuan GRI (0-100). | ESG <i>Intelligence</i> |
| Dewan Komisaris Independen | Independen | Proporsi jumlah komisaris independen terhadap total dewan komisaris. | Laporan tahunan |
| Komite Audit | Independen | Jumlah anggota komite audit perusahaan. | Laporan tahunan |
| Kepemilikan Asing | Moderasi | Persentase saham yang dimiliki investor asing terhadap total saham beredar. | Laporan tahunan/BEI |

Analisis data dilakukan dalam dua model. Model pertama digunakan untuk menguji pengaruh langsung dewan komisaris independen dan komite audit terhadap pengungkapan ESG. Model kedua digunakan untuk menguji efek moderasi kepemilikan asing melalui interaksi antara kepemilikan asing dengan masing-masing variabel independen. Pemisahan model ini penting karena pengaruh langsung dan pengaruh interaksi menjawab pertanyaan penelitian yang berbeda. Pengaruh langsung diuji melalui model dasar, sedangkan moderasi dinilai dari signifikansi variabel interaksi dalam model kedua. Secara matematis, model penelitian dirumuskan sebagai berikut.

Model 1: $ESG = a + b_1DKI + b_2KA + e$.

Model 2: $ESG = a + b_1DKI + b_2KA + b_3KSA + b_4(DKI \times KSA) + b_5(KA \times KSA) + e$.

Dalam model moderasi, seluruh *lower-order terms* dipertahankan agar koefisien interaksi dapat diinterpretasikan secara benar. Penelitian juga menggunakan pendekatan *mean-centering* pada model interaksi untuk menekan multikolinearitas non-esensial antara variabel utama dan variabel interaksi. Sebelum pengujian hipotesis, dilakukan analisis statistik deskriptif dan pengujian asumsi klasik yang meliputi normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa model tidak mengalami masalah multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi yang berarti. Walaupun uji *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan penyimpangan dari normalitas residual, jumlah observasi yang besar membuat inferensi model tetap dapat dilanjutkan secara memadai.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Gambaran Umum Sampel dan Statistik Deskriptif

Penelitian ini menggunakan 402 observasi yang berasal dari 134 perusahaan nonkeuangan selama tiga tahun pengamatan. Statistik deskriptif menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen memiliki nilai minimum 0,25, maksimum 1,00, dan rata-rata 0,45. Jumlah komite audit memiliki nilai minimum 2, maksimum 6, dan rata-

rata 3,12. Rata-rata skor ESG perusahaan sampel adalah 48,64 dengan rentang yang sangat lebar, dari 7,41 hingga 100. Sementara itu, kepemilikan asing memiliki rata-rata 24,88 dengan deviasi standar 26,54 yang menunjukkan heterogenitas tinggi antarperusahaan.

Tabel 3. Statistik Deskriptif

| Variabel | N | Min | Max | Mean | Std. Dev. |
|-----------------------------|-----|--------|--------|-------|-----------|
| Komisaris Independen | 402 | 0,25 | 1,00 | 0,45 | 0,12 |
| Komite Audit | 402 | 2,00 | 6,00 | 3,12 | 0,42 |
| ESG | 402 | 7,41 | 100,00 | 48,64 | 19,73 |
| Kepemilikan Asing | 402 | 0,0025 | 98,21 | 24,88 | 26,54 |

Sumber: hasil statistik deskriptif penelitian.

Tingginya variasi skor ESG mengindikasikan bahwa tingkat kedewasaan pelaporan keberlanjutan antarperusahaan masih belum merata. Di satu sisi, terdapat perusahaan yang telah menempatkan ESG sebagai bagian penting dari strategi korporasi dan pelaporan. Di sisi lain, masih terdapat perusahaan yang tingkat keterbukaan ESG-nya rendah. Variasi ini membuat pengujian faktor tata kelola menjadi relevan, karena perbedaan struktur pengawasan mungkin menjelaskan mengapa sebagian perusahaan lebih siap dalam mengungkapkan informasi ESG dibandingkan perusahaan lain.

4.2 Hasil Pengujian Model

Uji F menunjukkan bahwa kedua model layak digunakan. Nilai signifikansi model 1 dan model 2 sama-sama sebesar 0,001, yang berarti variabel independen dan variabel interaksi secara simultan relevan dalam menjelaskan variasi pengungkapan ESG. Koefisien determinasi juga meningkat dari model 1 ke model 2. Nilai R^2 pada model 1 sebesar 0,036 dengan *adjusted* R^2 0,031, sedangkan pada model 2 meningkat menjadi 0,066 dengan *adjusted* R^2 0,054. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa penambahan kepemilikan asing dan variabel interaksi memberi tambahan daya jelaskan terhadap variasi pengungkapan ESG, walaupun nilainya masih relatif rendah.

Tabel 4. Hasil Pengujian Hipotesis

| Variabel | Model 1 | | Model 2 | |
|----------------------|-----------|--------|-----------|-------|
| | Koefisien | Sig. | Koefisien | Sig. |
| <i>Konstanta</i> | 19,568 | 0,013 | 24,124 | 0,054 |
| Komisaris Independen | 5,254 | 0,526 | 22,926 | 0,046 |
| Komite Audit | 8,557 | <0,001 | 3,936 | 0,290 |
| Kepemilikan Asing | - | - | 0,078 | 0,034 |
| Interaksi DKI x KSA | - | - | 0,758 | 0,035 |
| Interaksi KA x KSA | - | - | -0,164 | 0,100 |
| R^2 | 0,036 | | 0,066 | |
| Adjusted R^2 | 0,031 | | 0,054 | |
| Sig. F | 0,001 | | 0,001 | |

Sumber: hasil pengolahan SPSS berdasarkan data penelitian.

Nilai *adjusted* R^2 yang rendah tidak mengurangi relevansi hasil penelitian ini. Pengungkapan ESG merupakan fenomena yang kompleks dan dipengaruhi banyak faktor, seperti ukuran perusahaan, profitabilitas, jenis industri, tekanan regulator, kapasitas organisasi, komitmen manajemen, serta orientasi pasar. Oleh karena itu,

mekanisme tata kelola yang diteliti dalam artikel ini lebih tepat dipahami sebagai sebagian dari determinan pengungkapan ESG, bukan sebagai satu-satunya penjelas.

4.3 Pembahasan Hipotesis 1: Dewan Komisaris Independen terhadap Pengungkapan ESG

Hasil pengujian model 1 menunjukkan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ESG. Dengan koefisien 5,254 dan tingkat signifikansi 0,526, hipotesis pertama tidak didukung. Temuan ini menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen yang lebih tinggi tidak secara otomatis menghasilkan pengungkapan ESG yang lebih luas.

Temuan tersebut memberi isyarat bahwa keberadaan komisaris independen pada banyak perusahaan sampel masih lebih merepresentasikan kepatuhan struktural daripada efektivitas substantif. Dalam praktik tata kelola, perusahaan dapat memenuhi ketentuan mengenai proporsi komisaris independen tanpa benar-benar menjadikan komisaris independen sebagai motor pendorong agenda keberlanjutan. Isu ESG sering kali tetap diletakkan pada tingkat manajerial-operasional, sementara dewan komisaris independen hanya terlibat secara umum dalam fungsi supervisi. Akibatnya, peningkatan proporsi komisaris independen belum cukup untuk mengubah kualitas pengungkapan ESG apabila tidak disertai kompetensi, keberanian, dukungan data, dan komitmen keberlanjutan yang kuat.

Penjelasan ini sejalan dengan kondisi beberapa perusahaan sampel yang memiliki proporsi komisaris independen tinggi tetapi skor ESG relatif rendah, seperti BIPI, BUKA, CASH, IMAS, dan SPMA. Pola tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara formal *governance structure* dan *substantive governance outcome*. Pada perusahaan-perusahaan tertentu, terutama yang sedang berfokus pada efisiensi, ekspansi, atau konsolidasi model bisnis, agenda ESG belum tentu menjadi prioritas utama meskipun struktur dewan tampak baik secara formal.

Dari sudut pandang *agency theory*, hasil ini menunjukkan bahwa mekanisme monitoring melalui komisaris independen belum cukup kuat untuk menekan asimetri informasi terkait isu ESG. Sementara itu, dari sudut pandang *legitimacy theory*, hasil ini mengindikasikan bahwa keberadaan komisaris independen belum otomatis diterjemahkan ke dalam strategi legitimasi yang nyata melalui pengungkapan keberlanjutan. Temuan ini konsisten dengan Rahmadani, Adrianto, dan Alfarisi (2023) serta Birindelli, Dell'Atti, Iannuzzi, dan Savioli (2018) yang juga menemukan tidak adanya pengaruh langsung komisaris independen terhadap ESG.

4.4 Pembahasan Hipotesis 2: Komite Audit terhadap Pengungkapan ESG

Hasil pengujian model 1 menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan ESG. Koefisien komite audit sebesar 8,557 dengan tingkat signifikansi di bawah 0,001 menunjukkan bahwa peningkatan jumlah anggota komite audit berkaitan dengan peningkatan skor pengungkapan ESG. Dengan demikian, hipotesis kedua didukung.

Temuan ini logis karena komite audit merupakan organ tata kelola yang paling dekat dengan proses pelaporan dan pengendalian internal. Berbeda dari komisaris independen yang menjalankan fungsi pengawasan pada level strategis, komite audit berinteraksi lebih langsung dengan informasi, sistem kontrol, proses *review*, dan kepatuhan. Dalam konteks ESG, fungsi ini sangat penting karena pelaporan ESG menuntut akurasi data, konsistensi pengukuran, dan kemampuan untuk menelaah ketercukupan pengungkapan. Semakin besar kapasitas komite audit, semakin besar

kemungkinan perusahaan memiliki pembagian tugas, diskusi, dan pengawasan yang lebih efektif atas informasi non-keuangan.

Hasil penelitian juga memperoleh dukungan dari pola empiris pada perusahaan sampel. Perusahaan dengan komite audit yang relatif kuat, seperti DSSA, INDY, LPKR, PGAS, PTBA, PTRO, dan WIKA, cenderung menunjukkan skor ESG yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa komite audit yang lebih kuat tidak sekadar memenuhi aturan, tetapi berpotensi mendorong kualitas pelaporan yang lebih baik. Pada sektor yang sensitif terhadap isu lingkungan dan sosial, seperti energi, pertambangan, dan infrastruktur, kebutuhan akan pelaporan yang andal membuat peran komite audit menjadi semakin penting.

Temuan ini memperkuat *agency theory* karena komite audit terbukti efektif sebagai mekanisme internal yang menurunkan asimetri informasi. Temuan ini juga mendukung *legitimacy theory* karena pengungkapan ESG yang lebih baik dapat dibaca sebagai upaya perusahaan untuk menjaga kepercayaan investor, regulator, dan masyarakat. Hasil ini konsisten dengan Pozzoli, Alessandra, dan Francesco (2022), Buallay dan Al-Ajmi (2018), Holly, Tangke, Jao, dan Tanri (2024), serta Ardiani, Lindrawati, dan Susanto (2022).

4.5 Pembahasan Hipotesis 3: Kepemilikan Asing Memoderasi Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Pengungkapan ESG

Pengujian model 2 menunjukkan bahwa interaksi antara dewan komisaris independen dan kepemilikan asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan ESG. Koefisien interaksi sebesar 0,758 dengan tingkat signifikansi 0,035 menunjukkan bahwa kepemilikan asing memperkuat hubungan antara dewan komisaris independen dan pengungkapan ESG. Selain itu, kepemilikan asing juga memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap ESG dengan signifikansi 0,034. Secara ekonometrika, pola ini menunjukkan bahwa kepemilikan asing berperan sebagai quasi moderator pada hubungan dewan komisaris independen dan pengungkapan ESG.

Hasil ini penting karena menjelaskan mengapa komisaris independen tidak berpengaruh dalam model dasar tetapi menjadi relevan dalam konteks tertentu. Secara substantif, komisaris independen baru menjadi lebih efektif ketika terdapat tekanan eksternal yang kuat dari investor asing. Investor asing biasanya lebih sensitif terhadap risiko reputasi, keberlanjutan, dan standar pelaporan global. Akibatnya, mereka mendorong perusahaan untuk tidak hanya memiliki struktur komisaris independen secara formal, tetapi juga memanfaatkan keberadaan komisaris independen untuk memperkuat transparansi ESG.

Temuan ini sejalan dengan pengamatan pada beberapa perusahaan sampel yang memiliki kepemilikan asing tinggi dan skor ESG yang kuat, seperti ADES, INCO, ITMG, HEAL, MDKA, MGRO, PTBA, TAPG, TOTL, dan TPIA. Pada perusahaan-perusahaan tersebut, kepemilikan asing tampak berperan sebagai katalis yang mengaktifkan fungsi komisaris independen. Dengan kata lain, *foreign ownership* memperbesar daya tawar komisaris independen dalam mendorong agenda keberlanjutan agar lebih diperhatikan oleh manajemen.

Dari perspektif *agency theory*, kepemilikan asing menambah lapisan *monitoring* eksternal yang menekan *opportunistic behavior* manajemen dan memperkuat pengawasan internal. Dari perspektif *legitimacy theory*, kepemilikan asing memperluas medan legitimasi perusahaan ke tingkat internasional. Perusahaan yang memiliki investor asing cenderung lebih terdorong menjaga reputasi global melalui

pengungkapan ESG yang lebih baik. Hasil ini menegaskan bahwa efektivitas tata kelola tidak selalu bersifat universal; ia dapat bergantung pada struktur kepemilikan dan karakter pemegang saham.

4.6 Pembahasan Hipotesis 4: Kepemilikan Asing Memoderasi Pengaruh Komite Audit terhadap Pengungkapan ESG

Berbeda dengan hipotesis ketiga, hasil pengujian menunjukkan bahwa interaksi antara komite audit dan kepemilikan asing tidak signifikan. Koefisien interaksi bernilai negatif sebesar -0,164 dengan tingkat signifikansi 0,100. Karena nilai signifikansi berada di atas 0,05, kepemilikan asing tidak terbukti memoderasi hubungan antara komite audit dan pengungkapan ESG. Dengan demikian, hipotesis keempat tidak didukung.

Hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh komite audit terhadap pengungkapan ESG bersifat lebih langsung dan relatif stabil, tidak tergantung pada tinggi rendahnya kepemilikan asing. Temuan ini dapat dijelaskan oleh sifat komite audit yang sangat teknis, terstandarisasi, dan dekat dengan proses pengendalian internal. Ketika komite audit sudah bekerja sesuai mandatnya, tambahan tekanan dari investor asing tidak lagi memberikan penguatan yang berarti. Dengan kata lain, komite audit telah memiliki mekanisme kerja yang cukup kuat untuk memengaruhi kualitas pengungkapan ESG tanpa harus menunggu kehadiran moderasi dari pemegang saham asing.

Pola ini terlihat pada perusahaan-perusahaan seperti WIKA, WSBP, dan WTON yang memiliki komite audit sesuai standar dan tetap menunjukkan kualitas pengungkapan ESG yang relatif baik, meskipun variasi kepemilikan asingnya tidak tinggi. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas komite audit lebih banyak dipengaruhi oleh struktur dan fungsi internal perusahaan daripada oleh struktur kepemilikan eksternal.

Secara teoretis, hasil ini memberi nuansa pada *agency theory* dan *legitimacy theory*. *Agency theory* tetap didukung karena komite audit terbukti sebagai mekanisme pengawasan internal yang efektif. Akan tetapi, teori tersebut tidak sepenuhnya menjelaskan perlunya penguatan tambahan dari kepemilikan asing pada jalur komite audit. Demikian pula *legitimacy theory* tetap relevan untuk menjelaskan pentingnya pengungkapan ESG, tetapi sumber dorongan legitimasi pada jalur ini tampak lebih banyak berasal dari mekanisme internal dan regulasi daripada dari tekanan pemegang saham asing. Dalam konteks model, kepemilikan asing pada jalur komite audit lebih tepat dipahami sebagai *predictor* yang berpengaruh langsung terhadap ESG, bukan sebagai moderator yang mengubah kekuatan pengaruh komite audit.

5. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan ESG pada perusahaan nonkeuangan di Indonesia tidak bersifat seragam. Dewan komisaris independen tidak terbukti berpengaruh langsung terhadap pengungkapan ESG. Temuan ini menandakan bahwa keberadaan komisaris independen secara struktural belum cukup untuk mendorong perusahaan meningkatkan transparansi keberlanjutan. Sebaliknya, komite audit terbukti berpengaruh positif terhadap pengungkapan ESG, yang berarti fungsi pengawasan yang dekat dengan proses pelaporan dan pengendalian internal memiliki peran yang lebih nyata dalam meningkatkan kualitas pengungkapan non-keuangan.

Penelitian ini juga membuktikan bahwa kepemilikan asing memperkuat hubungan antara dewan komisaris independen dan pengungkapan ESG. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas komisaris independen bersifat kondisional dan menjadi lebih kuat ketika perusahaan menghadapi tekanan eksternal dari investor asing. Namun, kepemilikan asing tidak terbukti memoderasi hubungan antara komite audit dan pengungkapan ESG. Temuan ini menunjukkan bahwa komite audit bekerja melalui jalur yang lebih langsung dan relatif stabil.

Secara keseluruhan, penelitian menegaskan bahwa pengungkapan ESG tidak hanya bergantung pada keberadaan struktur tata kelola, tetapi juga pada kualitas fungsi pengawasan dan pada konteks kepemilikan perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan yang ingin meningkatkan kualitas pengungkapan ESG perlu memperkuat efektivitas organ pengawasan secara substantif, bukan sekadar memenuhi persyaratan struktural.

6. Implikasi

Secara teoretis, artikel ini memberikan kontribusi pada pengembangan literatur *corporate governance* dan ESG dengan menunjukkan bahwa pengaruh mekanisme tata kelola tidak selalu linear dan seragam. Temuan bahwa komite audit berpengaruh langsung terhadap pengungkapan ESG memperkuat *agency theory*, khususnya peran monitoring internal dalam menekan asimetri informasi. Sementara itu, temuan bahwa komisaris independen hanya menjadi efektif ketika didukung kepemilikan asing memperlihatkan pentingnya memadukan perspektif *agency theory* dengan konteks struktur kepemilikan. Penelitian ini juga memperluas *legitimacy theory* dengan menunjukkan bahwa legitimasi perusahaan tidak hanya dibangun melalui kesesuaian terhadap harapan masyarakat domestik, tetapi juga melalui respons terhadap ekspektasi investor internasional.

Secara metodologis, penelitian ini menegaskan pentingnya memisahkan pengujian *direct effect* dan *interaction effect* dalam studi moderasi. Pengaruh langsung dewan komisaris independen dan komite audit lebih tepat dievaluasi melalui model dasar, sedangkan efek moderasi harus ditentukan dari signifikansi koefisien interaksi pada model kedua. Pendekatan ini membuat interpretasi hasil lebih akurat dan menghindari kekeliruan dalam menarik kesimpulan dari koefisien model interaksi.

Secara praktis, temuan artikel ini mengandung implikasi bagi manajemen, dewan komisaris, komite audit, dan investor. Bagi perusahaan, hasil penelitian menegaskan bahwa peningkatan kualitas pengungkapan ESG tidak cukup hanya dengan memenuhi komposisi komisaris independen secara administratif. Perusahaan perlu memastikan bahwa komisaris independen memiliki kompetensi, keterlibatan, dan ruang pengaruh yang memadai dalam isu keberlanjutan. Bagi komite audit, hasil penelitian menunjukkan pentingnya memperluas fokus pengawasan tidak hanya pada laporan keuangan, tetapi juga pada pelaporan ESG sebagai bagian dari integritas informasi korporat. Bagi investor dan regulator, hasil penelitian mengindikasikan bahwa *foreign ownership* dapat menjadi tekanan eksternal yang produktif untuk memperkuat disiplin tata kelola dan standar transparansi.

7. Saran Penelitian

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan model dengan menambahkan variabel lain yang secara teoritis relevan terhadap pengungkapan ESG, seperti ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, jenis industri, kualitas audit,

intensitas rapat dewan, pengalaman komisaris, dan tekanan media. Penambahan variabel tersebut dapat meningkatkan kemampuan model dalam menjelaskan variasi pengungkapan ESG yang pada penelitian ini masih relatif rendah.

Selain itu, penelitian berikutnya dapat mengembangkan pengukuran tata kelola perusahaan secara lebih substantif. Dewan komisaris independen tidak seharusnya hanya diproksi melalui proporsi, tetapi juga dapat diukur melalui kompetensi, latar belakang pendidikan, pengalaman internasional, masa jabatan, serta frekuensi rapat. Komite audit juga dapat diukur dengan indikator yang lebih kaya, seperti independensi, keahlian keuangan, frekuensi rapat, dan kualitas koordinasi dengan auditor internal maupun eksternal.

Saran berikutnya adalah menggunakan desain data panel yang lebih eksplisit dan mempertimbangkan standard error yang dikelompokkan pada level perusahaan agar inferensi menjadi lebih kuat. Penelitian selanjutnya juga dapat membandingkan sumber data ESG yang berbeda untuk mengurangi *disclosure bias* dan memperkaya validitas hasil. Di samping itu, akan sangat bermanfaat bila penelitian berikutnya menguji lebih jauh perbedaan sektor industri, terutama sektor dengan paparan lingkungan tinggi dan sektor berbasis teknologi atau jasa, agar dinamika hubungan antara tata kelola, kepemilikan, dan pengungkapan ESG dapat dipahami dengan lebih mendalam.

8. Daftar Pustaka

- Al Amosh, H., & Mansor, N. (2021). *Disclosure of integrated reporting elements by industrial companies: Evidence from Jordan*. *Journal of Management and Governance*, 25(1), 121-145.
- Ananda, R. F., & Yusnaini. (2023). *The effect of board of commissioners and board of directors on sustainability report disclosure in companies registered on the IDX 2020*. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(1), 1014-1021.
- Arayssi, M., Jizi, M., & Tabaja, H. H. (2019). *The impact of board composition on the level of ESG disclosures in GCC countries*. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, 11(1), 137-161.
- Ardiani, N. P. F., Lindrawati, & Susanto, A. (2022). Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* Terhadap Pengungkapan *Sustainability Report* Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana (JRAMB)*, 8(1).
- Baier, F., & Kunter, M. (2020). *Construction and validation of a test to assess (pre-service) teachers technological pedagogical knowledge (TPK)*. *Studies in Educational Evaluation*, 67. <https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2020.100936>
- Bicer, A. A., & Feneir, I. M. (2019). *The Impact of Audit Committee Characteristics on Environmental and Social Disclosures*. *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147-4478), 8(3), 111-121.
- Birindelli, G., Dell Atti, S., Iannuzzi, A. P., & Savioli, M. (2018). *Composition and activity of the board of directors: Impact on ESG performance in the banking system*. *Sustainability* (Switzerland), 10(12), 1-20. <https://doi.org/10.3390/su10124699>
- Buallay, A., & Al-Ajmi, J. (2018). *The role of audit committee attributes in corporate sustainability reporting: Evidence from banks in the Gulf Cooperation Council*. *Journal of Applied Accounting Research*, 19(4), 505-532. <https://doi.org/10.1108/JAAR-06-2018-0085>.

- Buallay, A. M., & Aldhaen, E. S. (2018). *The relationship between audit committee characteristics and the level of sustainability report disclosure. Paper presented at the 17th IFIP WG 6.11 Conference on e-Business, e-Services, and eSociety, Kuwait City.*
- Burlea, A. S., & Popa, I. (2013). *Legitimacy Theory. Encyclopedia of Corporate Social Responsibility*, 1579-1584. https://doi.org/10.1007/978-3-642-28036-8_471.
- Carney, M., Estrin, S., Liang, Z., & Shapiro, D. (2019). *National institutional systems, foreign ownership and firm performance: The case of understudied countries. Journal of World Business*, 54(4), 244-257.
- Correa-Garcia, J. A., Garcia-Benau, M. A., & Garcia-Meca, E. (2020). *Corporate governance and its implications for sustainability reporting quality in Latin American business groups. Journal of Cleaner Production*, 260, 121142.
- Chung, R., Firth, M. and Kim, J. B. (2002). *Institutional monitoring and opportunistic earnings management. Journal of Corporate Finance*, 8(1), 29-48.
- Deegan, Craig. (2004). *Financial Accounting Theory. New South Wales: McGraw-Hill Australia.*
- Denis, D. K., & McConnell, J. J. (2003). *International corporate governance. Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 38(1), 1-36.
- Dzulkifli dan Dewayanto, Totok. (2022). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Ukuran Komite Audit, Keahlian Komite Audit, Rapat Komite Audit, Rapat Dewan Pengawas Syariah Terhadap Audit Report Lag (Studi Empiris pada Perbankan Syariah yang Terdaftar di OJK Tahun 2016-2020). *Diponegoro Journal of Accounting*, 11(2), 2337-3806.
- Ellili, N. O. D. (2022). *Impact of corporate governance on environmental, social, and governance disclosure: Any difference between financial and non-financial companies? Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 30(2), 858-873.
- Farida, L. Y. N dan Kusumadewi, Rr. K. A. (2019). Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Komite Audit Terhadap Manajemen Laba. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(3), 1-12.
- García, J. A. C., Benau, M. A. G., & Meca, E. M. (2020). *Corporate governance and its implications for sustainability reporting quality in Latin America. Journal of Cleaner Production*, 260, 121142. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.121142>.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23. Edisi 8.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic Econometrics* (5th ed.). McGrawHill Higher Education.
- Gurol, B., & Lagasio, V. (2023). *Women board members impact on ESG disclosure with environment and social dimensions: Evidence from the European banking sector. Social Responsibility Journal*. <https://doi.org/10.1108/SRJ-08-2020-0308>.
- Hamdani. (2016). *Good Corporate Governance: Tinjauan Etika dalam Praktik Bisnis.* Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Hirmansah, A. (2024). Komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan asing dan kualitas laba. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer*, 2(1), 13-25.

- Holly, A., Tangke, P., Jao, R., & Tanri, E. P. (2024). Pengaruh Komite Audit dan Kepemilikan Asing Terhadap Nilai perusahaan yang Dimediasi Oleh *Sustainability Report*. *Journal of Accounting and Finance*, 8(1), 12-39.
- Husaini, dan Saiful. (2018). *Enterprise Risk Management, Corporate Governance and Firm Value: Empirical Evidence from Indonesian Public Listed Companies*. IJAME. <http://managementjournal.info/index.php/IJAME/article/view/23>
- Husna, G. A., Yuhertiana, I., & Susilowati, E. (2023). Pengaruh *good corporate governance* terhadap pengungkapan ESG dan kinerja perusahaan pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022. *Jurnal Sosains: Jurnal Sosial dan Sains*, 3(12), 1235-1243.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure*. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.
- Jimantoro, C., Maria, K. A., & Rachmawati, D. (2023). Mekanisme Tata Kelola dan Pengungkapan *Environmental, Social, Governance*. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 19(1), 31. <https://doi.org/10.21460/jrak.2023.191.440>.
- Josua, R., & Septiani, A. (2020). Analisis pengaruh karakteristik komite audit terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan (Studi empiris pada perusahaan yang terdaftar pada BEI tahun 2015-2018). *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(3), 1-9.
- Khanna, T. and Palepu, K. (2000). *Is Group Affiliation Profitable in Emerging Markets? An Analysis of Diversified Indian Business Groups*. *The Journal of Finance*, 55, 867-891. <http://dx.doi.org/10.1111/0022-1082.00229>
- Kim, S., & Li, Z. (2021). *Understanding the impact of ESG practices in corporate finance. Sustainability* (Switzerland), 13(7). <https://doi.org/10.3390/su13073746>
- Maisaroh, S., & Setiawan, D. (2021). Kepemilikan saham asing, dewan komisaris asing dan direksi asing terhadap penghindaran pajak di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 21(1), 29-42.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2015). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Indonesia.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2014). Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian. Jakarta.
- Pozzoli, M., Alessandra, A., & Francesco, F. (2022). *Corporate governance and environmental, social, and governance (ESG) disclosure and its effect on the cost of capital in emerging markets*. *Journal of Risk and Financial Management*, 15(6), 1-19. <https://doi.org/10.3390/jrfm15060308>.
- Puspitasari, Nurma., Prihatni, Rida., dan Yusuf, Muhammad. (2023). Pengaruh Good *Corporate Governance* dan *Financial Distress* Terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*, 4(3), 671-687.
- Rahmadani, F., Adrianto, F., & Alfarisi, M. F. (2023). *Is it Corporate Governance, Industry, and Profitability Matter on ESG Performance? Evidence from Indonesian Companies*. *Journal of Social Research*, 2(3), 804-817.
- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67. Jakarta.

- Roestanto, A., Vivianita, A., & Nurkomalasari, N. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Jenis Industri, dan Struktur Kepemilikan Terhadap *Environmental, Social, and Governance (ESG) Disclosure* (Studi Empiris Perusahaan di Indonesia yang Terdaftar di IDX 2017-2020). *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, 8.
- Serafeim, G., & Yoon, A. (2022). *Which Corporate ESG News Does the Market React To? Financial Analysis Journal*, 48(1), 59-78. <https://doi.org/10.1080/0015198X.2021.1973879>
- Sirait & Fuad. (2024). Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Pengungkapan *Environmental, Social, And Governance (ESG)*. *Diponegoro Journal of Accounting*, 13(1), 1-14. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Shafira, H., & Astuti, C. D. (2024). ESG disclosure dan dewan komisaris independen terhadap nilai perusahaan dengan kualitas audit sebagai variabel moderasi. *Journal of Management and Bussines (JOMB)*, 6(2), 664-676. <https://doi.org/10.31539/jomb.v6i2.8936>
- Spencer Stuart. (2020). *Spencer Stuart 2020 Board Index*. Chicago: Spencer Stuart.
- Suchman, M. C. (1995). *Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches*. *Academy of Management Review*, 20(3), 571-610.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tambunan, R., & Wahyuliza, S. (2024). Pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing terhadap pengungkapan ESG (Studi empiris pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 13(2), 74-89.
- Umar, U. H., Firmansyah, E. A., Danlami, M. R., & Al-Faryan, M. A. S. (2024). *Revisiting the relationship between corporate governance mechanisms and ESG disclosures in Saudi Arabia*. *Journal of Accounting & Organizational Change*, 20(4), 724-747. <https://www.idx.co.id>
<https://www.esgi.ai/>
- Yu, X., & Xiao, K. (2022). *Does ESG Performance Affect Firm Value? Evidence from a New ESG Scoring Approach for Chinese Enterprises*. *Sustainability*, 14(24), 1-40. <https://doi.org/10.3390/su142416940>.
- Yuliyanti, A., & Cahyonowati, N. (2023). Pengaruh dewan direksi, dewan komisaris, komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 12(3), 1-14. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>